

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Setiap negara tentu memiliki anggota masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Tentunya di setiap negara permasalahan kemiskinan ini telah menjadi masalah yang global. Kemiskinan juga dapat diartikan sebagai kekurangan dalam kesejahteraan dan perampasan terhadap kebebasan untuk mencapai sesuatu dalam hidup. Penyebab kemiskinan adalah minimnya ketersediaan lapangan kerja sehingga menimbulkan banyaknya pengangguran, masih rendahnya tingkat pendidikan, dan belum meratanya pembangunan di setiap daerah. Semakin meningkat tingkat upah minimum akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga kesejahteraan juga meningkat dan sehingga terbebas dari kemiskinan.

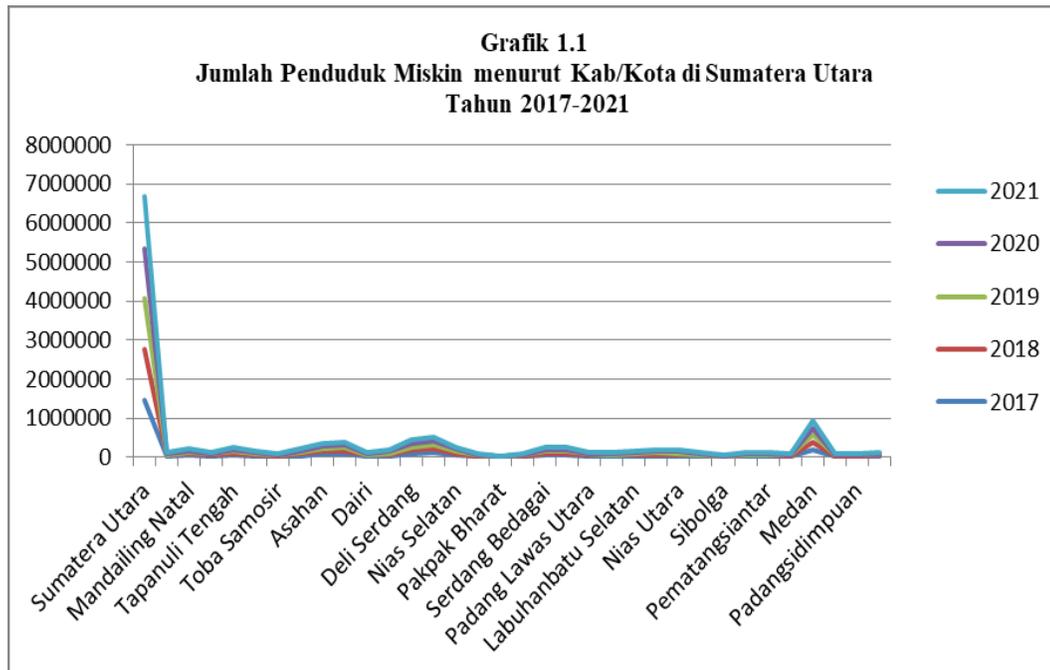
Pengentasan kemiskinan menjadi fokus utama pemerintahan, sebagai perwujudan dari tujuan pembangunan nasional yakni mensejahterahkan masyarakat. Berbagai kebijakan dan program sebagai bentuk upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah masih dirasa kurang cukup. Maka strategi pengentasan kemiskinan haruslah terpadu, terintegritas dan sinergis agar tercapainya tujuan pelaksanaan program (Muchtolifah, 2022). kemiskinan adalah suatu kondisi ketika seseorang atau kelompok tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan yang layak. Hal ini juga biasanya ditentukan oleh pemerintah

melalui penetapan garis kemiskinan yang ditentukan dengan ekonomi.

Sedangkan menurut kuncoro dalam (Girsang, 2020) Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus dipenuhi tersebut meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. dalam Tingkat kesejahteraan masyarakat ditentukan oleh kebijakan ekonomi pemerintah. Jadi kemiskinan bisa juga disebabkan oleh gagalnya perkembangan ekonomi yang direncanakan pemerintah. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global (Wulandari, 2021). Sejalan dengan tujuan tersebut, berbagai kegiatan pembangunan telah diarahkan kepada pembangunan daerah khususnya daerah yang relatif tertinggal.

Pembangunan daerah dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran pembangunan nasional (yulianita ratna dwihapsari, 2017). Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sementara menurut (Ristika et al., 2021) dalam Todaro dan Smith (2006: 23), kemiskinan bukan suatu kondisi kekurangan suatu komoditi ataupun masalah kepuasan dari komoditi tersebut namun kemiskinan lebih cenderung merupakan kondisi masyarakat yang kurang dapat memaksimalkan fungsi dan mengambil manfaat dari komoditi

tersebut.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)2021

Grafik 1.1 Jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara mengalami fluktuasi dari tahun 2017 sampai 2021. Kota Medan adalah wilayah yang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi, yakni sebesar 183.54 juta jiwa penduduk pada Maret 2020. Disusul Kabupaten Langkat sebesar 101.87 juta jiwa penduduk dan Kabupaten Deli Serdang 86.26 juta jiwa penduduk. Pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin berdasarkan Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Utara yang paling banyak terdapat di Kota Medan dengan jumlah 204.22 juta jiwa, pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin terdapat di Kota medan dengan jumlah 186.45 juta jiwa, pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin berdasarkan Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Barat yang paling banyak

terdapat di Kota Medan dengan jumlah 183.79 juta jiwa, sedangkan pada tahun 2020 yang paling banyak jumlah penduduk miskin terdapat di Kota Medan dengan jumlah 183.54 juta jiwa, dan yang terakhir pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin terdapat di Kota Medan sebesar 19.03 juta jiwa..

Sementara persentase penduduk miskin berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Di tahun 2021 Nias Barat merupakan kabupaten/kota di Sumatera Utara dengan tingkat kemiskinan tertinggi, yakni mencapai 26,42% dari total penduduk. Diikuti Kabupaten Nias Utara dengan angka kemiskinan 25,66%. Artinya, 1 dari 4 penduduk di kedua kabupaten di tersebut hidup di bawah garis kemiskinan. Kemudian sebanyak 16,92% penduduk di Kabupaten Nias Selatan di bawah garis kemiskinan. Sementara persentase penduduk miskin di Kabupaten Nias sebesar 16,82%. Berikutnya, angka penduduk miskin juga banyak berada di Kota Gunungsitoli mencapai 16,45%, kemudian Kota Tanjung Balai sebesar 13,4%, dan Kabupaten Samosir sebesar 12,68%, Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar 12,67%, serta Kabupaten Batu Bara dan Kota Sibolga masing-masing sebesar 12,38% dan 12,33%. persentase penduduk miskin di daerah perkotaan tercatat sebesar 8,68 persen pada September 2021 lalu.

Sedangkan di daerah pedesaan sebesar 8,26 persen. Untuk daerah perkotaan, persentase penduduk miskin tercatat mengalami penurunan sebesar 0,47 poin jika dibandingkan Maret 2021. Sedangkan daerah pedesaan berkurang sebesar 0,58 poin. rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung meningkat dan semakin mendekati garis kemiskinan. Penurunan kedalaman kemiskinan juga terjadi pada Maret 2021 lalu. Berdasar catatan BPS, Faktor pandemi Covid-19 yang

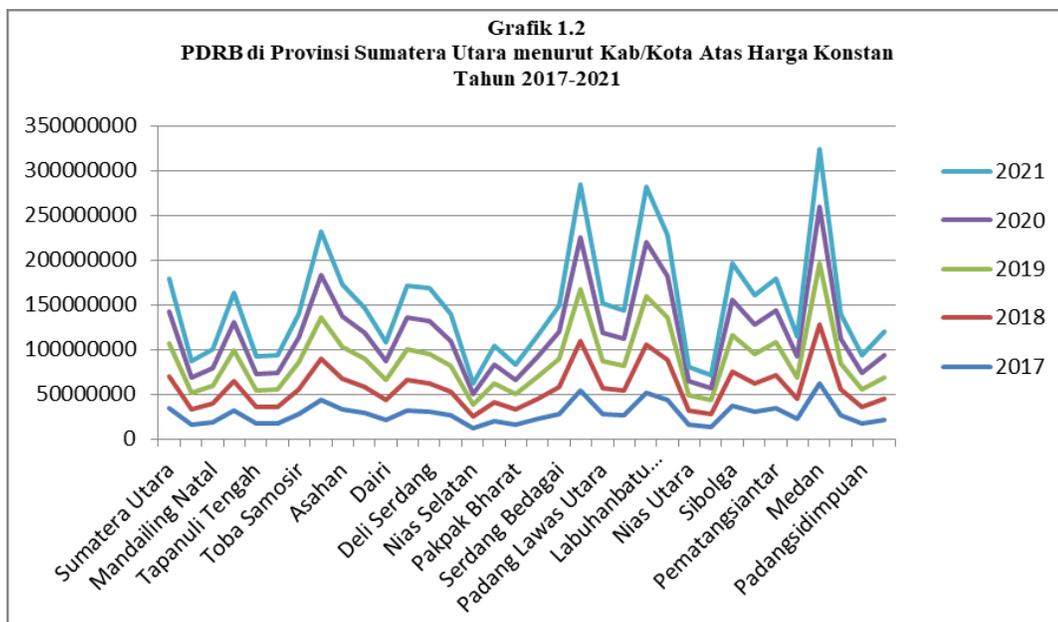
berkelanjutan diduga mempengaruhi tingkat kemiskinan di Sumatra Utara pada periode Maret-September 2021 Hal ini sangat berdampak pada perubahan perilaku serta aktivitas ekonomi penduduk, sehingga mempengaruhi angka kemiskinan.

Provinsi Sumatera Utara merupakan provinsi dengan penduduk miskin paling tinggi di Pulau Sumatera dan tertinggi keempat di Indonesia di tahun 2021 beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin, mulai dari pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan jumlah pengangguran terbuka. Permasalahan kemiskinan dihadapi oleh hampir semua negara didunia, baik negara maju maupun negara berkembang, hanya saja tingkat kemiskinan di negara maju tidak setinggi tingkat kemiskinan negara berkembang. Menurut (Abarca, 2021) dalam Sukirno, 2000 pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat, tidak akan berlangsung secara terus-menerus. Pada suatu saat pertumbuhan ekonomi akan menjadi semakin lambat. Bahkan sering juga terjadi keadaan di mana kegiatan ekonomi mengalami kemunduran, yang dapat dilihat dari berlakunya tingkat pertumbuhan ekonomi yang negatif.

Hal ini menggambarkan bahwa pendapatan nasional pada tahun tertentu lebih rendah dari tahun sebelumnya. Dalam kondisi seperti ini biasanya tingkat pengangguran semakin meningkat, sebagai akibat oleh tindakan perusahaan-perusahaan mengurangi operasinya dan mengurangi penggunaan tenaga kerja. Pertumbuhan penduduk yang cepat di negara-negara berkembang harus diturunkan jika tidak ingin pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat, dan hampir semua ekonom sepakat dengan hal tersebut. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah Faktor Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi

menjadi salah satu indikator keberhasilan suatu negara. Proses pembangunan memerlukan pendapatan nasional yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat.

Di banyak negara syarat utama bagi terciptanya penurunan kemiskinan yang tetap adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi memang tidak cukup untuk mengentaskan kemiskinan tetapi biasanya pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang dibutuhkan, walaupun begitu pertumbuhan ekonomi yang bagus pun menjadi tidak akan berarti bagi penurunan masyarakat miskin jika tidak diiringi dengan pemerataan pendapatan (Hapsari Wiji Utamia dan Siti Umajah Masjkurib, 2018).



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)2021

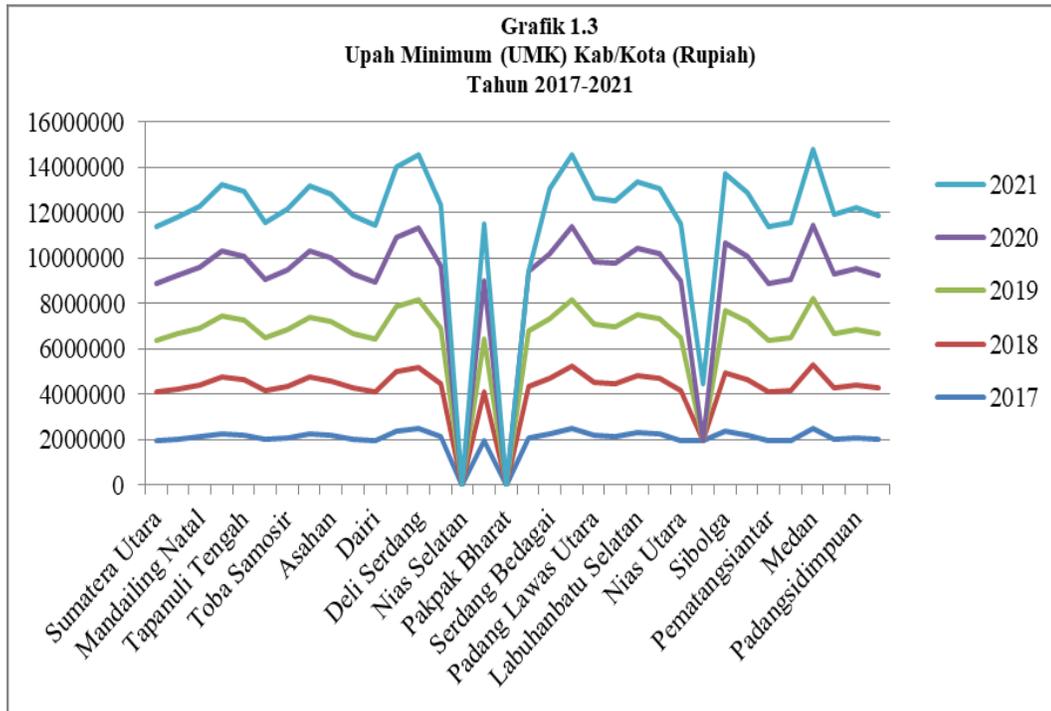
Grafik 1.2. menunjukkan bahwa PDRB pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan tiap tahunnya. PDRB pada tahun 2017 sebesar Rp 419 922,92 Dalam milyar mengalami peningkatan sebesar Rp 556 835,87 dalam Milyar pada tahun 2021. Peningkatan nilai PDRB pada tahun 2017

sampai dengan tahun 2021 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan pada periode 2017 sampai dengan 2021.

Namun peningkatan pertumbuhan ekonomi tiap tahun belum tentu menjamin tingkat kesejahteraan penduduk pada suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu menggambarkan penurunan kemiskinan secara signifikan. Hal ini dikarenakan pembangunan ekonomi tidak semata-mata diukur berdasarkan pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) secara keseluruhan, tetapi harus memperhatikan sejauh mana distribusi pendapatan telah menyebar secara merata ke lapisan masyarakat serta siapa yang telah menikmati hasil-hasilnya (Sukirno, 2000: 14). Apabila tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu negara menurun maka menyebabkan negara tersebut mengalami beberapa masalah ekonomi seperti pengangguran dan tingkat kemiskinan. Apabila tingkat kemiskinan terlalu tinggi, maka akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi di suatu negara atau provinsi menjadi menurun.

Selain faktor pertumbuhan ekonomi kebijakan upah minimum juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. UMK adalah singkatan dari Upah Minimum Kota/Kabupaten. Ia merupakan upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap. Penetapan upah minimum inilah yang akan berlaku di sebuah wilayah kabupaten/kota setelah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Presiden No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Upah minimum ini juga sebenarnya bisa disesuaikan dengan gaji pokok, tetapi terkadang bisa juga tidak. Aturan mengenai kenaikan upah pun biasanya ditetapkan melalui diskusi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja atau yang disebut dengan

tripartite.

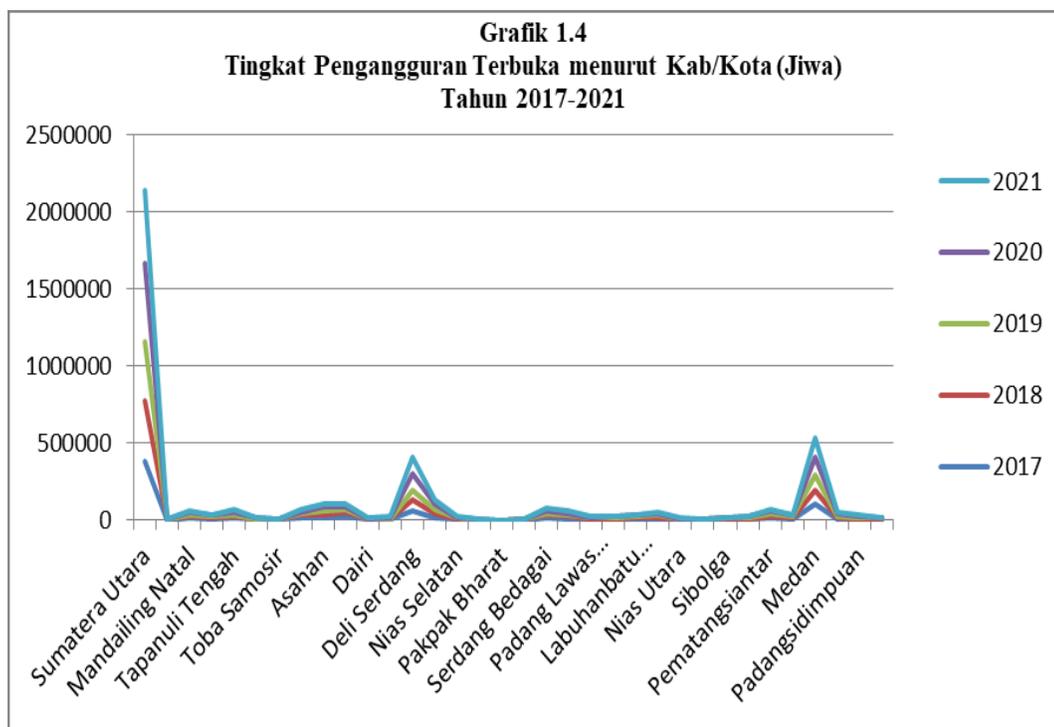


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)2021

Grafik 1.3 Adapun UMK dari tahun 2017-2021 yang tertinggi adalah kota medan. Medan menjadi kota yang UMK nya selalu mengalami kenaikan secara signifikan. kenaikan UMR Medan tahun 2017 Rp 2,528 juta, tahun 2018 Rp 2,749 juta, tahun 2019 Rp 2,969 juta, tahun 2020 Rp 3,222 juta, dan tahun 2021 yakni Rp 3,329 juta disusul Deli Serdang Rp 3,188 juta, Karo Rp 3,070 juta, Tapanuli Selatan Rp 2,903 juta dan Labuhan Batu Rp2,895juta. Selain itu faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah tingkat pengangguran terbuka, tingkat pengangguran yang tinggi dapat menyebabkan peningkatan kemiskinan di suatu daerah. Pengangguran terjadi karena ketersediaan kesempatan kerja di daerah tersebut sangat rendah yang dapat menyebabkan masyarakat di daerah

tersebut tidak memiliki pekerjaan (Ristika et al., 2021).

Pengangguran timbul karena ekonomi secara keseluruhan dalam suatu negara belum mampu menyediakan lapangan kerja untuk seluruh angkatan kerja yang ada, berarti mereka yang tidak tertampung menjadi menganggur (Ainunnisa & Hidayat, 2019). Di sini dibutuhkan peranan pemerintah yang kreatif dan aktif untuk memperluas lapangan kerja atau dengan kata lain menciptakan terobosan-terobosan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja (Ibrahim, 2021). Pengangguran terbuka adalah Sebuah kondisi seseorang termasuk pada angkatan kerja namun belum mendapatkan suatu pekerjaan (Luh et al., 2021). Di Provinsi Sumatera Utara, pada tahun 2017-2021 tingkat pengangguran terbuka mengalami fluktuasi.



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)2021

Grafik 1.4 Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka (TPT) tertinggi pada tahun 2017 adalah kota medan sebesar 101.634 jiwa dan pada tahun 2021 tingkat pengangguran tertinggi adalah kota Medan sebesar 121.065 jiwa, dan tingkat pengangguran terbuka terendah pada tahun 2017 berada Pakpak Bharat sebesar 131 jiwa dan pada tahun 2019 turun menjadi 50 jiwa dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 578 jiwa dan turun menjadi 410 jiwa pada tahun 2021 .

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul “ Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Tingkat Pengangguran Terbuka, Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2021”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, maka permasalahan dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2017- 2021?
2. Seberapa besar Pengaruh Upah Minimum (UMK) terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2017- 2021?
3. Seberapa besar pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat

kemiskinan di Kabupaten /Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2017- 2021?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang ada pada rumusan masalah di atas :

1. Mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatra Utara Tahun 2017-2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum (UMK) terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatra Utara Tahun 2017-2021.
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatra Utara Tahun 2017-2021.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk menilai pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum (UMK) dan tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan.
2. Sebagai bahan referensi pada bidang pertumbuhan ekonomi, upah minimum (UMK) dan tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan.
3. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan pengalaman dalam meneliti perihal tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara.